

Polisi Dinilai Lambat

● Kasus Raibnya Kas Daerah

SEMARANG - Kasus hilangnya kas daerah Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar yang sempat menggegerkan masyarakat, kini seakan menguap tanpa kejelasan. Kasus seakan berhenti pada penyidikan, tanpa ada informasi tentang kelanjutan kasus dan siapa saja yang terlibat dalam lenyapnya dana kas daerah (kasda) Pemkot Semarang di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Semarang.

Padahal Maret 2015 lalu, kasus ini sempat diselidiki dua lembaga, Polrestabes Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejaksaan Tinggi kemudian memutuskan menghentikan kasus dugaan korupsi dana kas daerah Pemkot Semarang tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke Polrestabes Semarang.

Pihak kepolisian pun dinilai tak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi itu. Meski sudah menetapkan dua tersangka, Suhantoro, mantan pejabat UPTD Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dan Diah Ayu Kusumaningrum, mantan pegawai BTPN, sampai sekarang belum ada tanda-tanda kasus yang bergulir sejak delapan bulan silam itu bakal dilimpahkan ke pengadilan.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menilai, dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Tipikor Polrestabes Se-

marang terbilang lambat. Menurutnya polisi harus bisa cepat memunculkan siapa aktor-aktor yang bermain dalam dugaan korupsi tersebut.

"Ini dugaan korupsi berjamaah. Polisi harus ke arah sana," kata Eko beberapa waktu lalu.

Hasil Audit

Informasinya, pihak Polrestabes Semarang berdalih saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui kerugian negara. Kapolrestabes Semarang, Kombes Burhanuddin mengatakan, kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Kas Daerah Pemkot Semarang belum ada perkembangan signifikan.

"Belum ada perkembangan. Sementara ini masih menunggu audit BPK," ujarnya.

Diah saat ini tak ditahan oleh penyidik. Alasannya, sejauh ini Diah memenuhi panggilan dari penyidik terkait pemeriksaan dalam kasus tersebut. Sementara Suhantoro kini ditahan dalam kasus berbeda, dugaan korupsi dana KONI Kota Semarang yang ditangani oleh Kejari Semarang.

Burhanudin juga pernah mengatakan, audit dari BPK diperlukan sebagai barang bukti berapa kerugian negara akibat kasus korupsi Kasda Kota Semarang tersebut. Sehingga proses penyidikan ke mana saja aliran dana tersebut bisa diketahui.

(Sambungan Hal 17)

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak ingin mengulur-ulur waktu untuk penyelesaian kasus ini hingga tuntas.

Seperti diketahui, pertengahan Januari lalu diketahui kas daerah Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar yang disimpan di BTPN lenyap.

Kasus ini terkuak ketika Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), Yudi Mardiana, mendatangi BTPN Jalan Pandanaran. Saat itu, Yudi menunjukkan sertifikat deposito untuk pencairan, namun pihak bank tidak mengakui keaslian sertifikat tersebut. Pihak bank menyatakan ada tiga rekening baru atas nama Pemkot Semarang.

Dua bulan kemudian, Pemkot Semarang melaporkan raibnya uang itu ke Polrestabes Semarang, sementara pihak BPTN melaporkan seorang oknum mantan pegawainya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan terkait raibnya deposito Pemkot Semarang itu. Sayangnya, hingga kini kasus itu tak juga menemukan titik terang, karena berhenti pada dua tersangka, dan kas daerah yang hilang juga belum ditemukan. (H71, fri, K44, H74-96)

(Bersambung hlm 20 kol 3)